



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
JL Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 552/DJU/HM.02.3/6/2022

Jakarta, 17 Juni 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penandatanganan Nota Kesepahaman dan
Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana
Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
(Daftar Terlampir)

Memperhatikan surat Menko Polhukam Nomor B.1723/HK.00.01/6/2022 tanggal 15 Juni 2022 Hal Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang akan dilaksanakan pada tanggal **21 Juni 2022** oleh Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan pimpinan Kementerian / Lembaga lainnya yang terkait bertempat di Mahkamah Agung, diminta kepada seluruh perwakilan yang ditunjuk pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana daftar terlampir untuk mengikuti acara tersebut di atas secara daring melalui *zoom meeting* dengan link sebagai berikut :

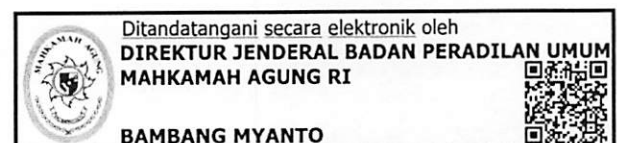
ID Meeting : **811 0130 4259**

Password : **#indonesia**

Adapun perwakilan dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengikuti acara tersebut adalah :

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Hakim Pengadilan Tinggi
3. Panitera Pengadilan Tinggi
4. Ketua Pengadilan Negeri
5. Hakim Pengadilan Negeri
6. Panitera Pengadilan Negeri

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan diikuti sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

Lampiran : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor : 552/DJU/HM.02.3/6/2022
Tanggal : 17 Juni 2022

**DAFTAR NAMA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI PESERTA
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PEDOMAN KERJA BERSAMA
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI)
MELALUI ZOOM MEETING**

NO	NAMA SATUAN KERJA
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2	Pengadilan Negeri Banda Aceh
3	Pengadilan Negeri Kuala Simpang
4	Pengadilan Negeri Idi
5	Pengadilan Negeri Langsa
6	Pengadilan Negeri Lhokseumawe
7	Pengadilan Negeri Lhoksukon
8	Pengadilan Negeri Bireuen
9	Pengadilan Negeri Sigli
10	Pengadilan Tinggi Medan
11	Pengadilan Negeri Simalungun
12	Pengadilan Negeri Kisaran
13	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
14	Pengadilan Negeri Mandailing Natal
15	Pengadilan Negeri Balige
16	Pengadilan Negeri Sei Rampah
17	Pengadilan Negeri Stabat
18	Pengadilan Negeri Sibolga
19	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
20	Pengadilan Negeri Tarutung
21	Pengadilan Negeri Pematang Siantar
22	Pengadilan Negeri Rantau Prapat
23	Pengadilan Negeri Kabanjahe
24	Pengadilan Negeri Binjai
25	Pengadilan Negeri Medan
26	Pengadilan Tinggi Padang
27	Pengadilan Negeri Pasaman Barat
28	Pengadilan Negeri Pariaman
29	Pengadilan Negeri Padang
30	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
31	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
32	Pengadilan Negeri Batam
33	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
34	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
35	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
36	Pengadilan Negeri Rokan Hilir
37	Pengadilan Negeri Pelalawan
38	Pengadilan Negeri Tembilahan
39	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri
40	Pengadilan Negeri Bengkalis
41	Pengadilan Negeri Pekanbaru
42	Pengadilan Negeri Bangkinang
43	Pengadilan Negeri Dumai

NO	NAMA SATUAN KERJA
44	Pengadilan Tinggi Jambi
45	Pengadilan Negeri Sengeti
46	Pengadilan Negeri Muara Bungo
47	Pengadilan Negeri Jambi
48	Pengadilan Tinggi Palembang
49	Pengadilan Negeri Prabumulih
50	Pengadilan Negeri Sekayu
51	Pengadilan Negeri Muara Enim
52	Pengadilan Negeri Palembang
53	Pengadilan Negeri Kayuagung
54	Pengadilan Negeri Baturaja
55	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
56	Pengadilan Negeri Lahat
57	Pengadilan Tinggi Bengkulu
58	Pengadilan Negeri Arga Makmur
59	Pengadilan Negeri Curup
60	Pengadilan Negeri Bengkulu
61	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
62	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
63	Pengadilan Negeri Sukadana
64	Pengadilan Negeri Gunung Sugih
65	Pengadilan Negeri Kalianda
66	Pengadilan Negeri Tanjung Karang
67	Pengadilan Negeri Metro
68	Pengadilan Negeri Kotabumi
69	Pengadilan Negeri Kota Agung
70	Pengadilan Negeri Menggala
71	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
72	Pengadilan Negeri Sungai Liat
73	Pengadilan Negeri Mentok
74	Pengadilan Negeri Pangkalpinang
75	Pengadilan Tinggi Jakarta
76	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
77	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
78	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
79	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
80	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
81	Pengadilan Tinggi Bandung
82	Pengadilan Negeri Majalengka
83	Pengadilan Negeri Cibadak
84	Pengadilan Negeri Sumber
85	Pengadilan Negeri Bale Bandung
86	Pengadilan Negeri Depok
87	Pengadilan Negeri Cibinong
88	Pengadilan Negeri Indramayu
89	Pengadilan Negeri Cirebon
90	Pengadilan Negeri Cianjur
91	Pengadilan Negeri Sukabumi
92	Pengadilan Negeri Bandung
93	Pengadilan Negeri Sumedang
94	Pengadilan Negeri Tasikmalaya
95	Pengadilan Negeri Garut
96	Pengadilan Negeri Ciamis
97	Pengadilan Negeri Purwakarta
98	Pengadilan Negeri Bekasi
99	Pengadilan Negeri Bogor
100	Pengadilan Negeri Subang

NO	NAMA SATUAN KERJA
101	Pengadilan Negeri Karawang
102	Pengadilan Tinggi Semarang
103	Pengadilan Negeri Kebumen
104	Pengadilan Negeri Temanggung
105	Pengadilan Negeri Surakarta
106	Pengadilan Negeri Klaten
107	Pengadilan Negeri Cilacap
108	Pengadilan Negeri Banyumas
109	Pengadilan Negeri Magelang
110	Pengadilan Negeri Batang
111	Pengadilan Negeri Semarang
112	Pengadilan Negeri Pekalongan
113	Pengadilan Negeri Pati
114	Pengadilan Negeri Pemalang
115	Pengadilan Negeri Kendal
116	Pengadilan Negeri Demak
117	Pengadilan Negeri Jepara
118	Pengadilan Negeri Blora
119	Pengadilan Negeri Purwodadi
120	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
121	Pengadilan Negeri Bantul
122	Pengadilan Negeri Wates
123	Pengadilan Negeri Sleman
124	Pengadilan Negeri Yogyakarta
125	Pengadilan Tinggi Surabaya
126	Pengadilan Negeri Pasuruan
127	Pengadilan Negeri Probolinggo
128	Pengadilan Negeri Lumajang
129	Pengadilan Negeri Madiun
130	Pengadilan Negeri Ngawi
131	Pengadilan Negeri Magetan
132	Pengadilan Negeri Sumenep
133	Pengadilan Negeri Bangkalan
134	Pengadilan Negeri Sampang
135	Pengadilan Negeri Kab. Kediri
136	Pengadilan Negeri Kepanjen
137	Pengadilan Negeri Malang
138	Pengadilan Negeri Blitar
139	Pengadilan Negeri Tulungagung
140	Pengadilan Negeri Tuban
141	Pengadilan Negeri Bojonegoro
142	Pengadilan Negeri Surabaya
143	Pengadilan Negeri Lamongan
144	Pengadilan Negeri Gresik
145	Pengadilan Negeri Sidoarjo
146	Pengadilan Negeri Mojokerto
147	Pengadilan Negeri Jombang
148	Pengadilan Negeri Bondowoso
149	Pengadilan Negeri Jember
150	Pengadilan Negeri Banyuwangi
151	Pengadilan Negeri Nganjuk
152	Pengadilan Negeri Kediri
153	Pengadilan Negeri Situbondo
154	Pengadilan Tinggi Banten
155	Pengadilan Negeri Tangerang
156	Pengadilan Negeri Pandeglang
157	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung

NO	NAMA SATUAN KERJA
158	Pengadilan Negeri Serang
159	Pengadilan Tinggi Denpasar
160	Pengadilan Negeri Denpasar
161	Pengadilan Negeri Singaraja
162	Pengadilan Tinggi Mataram
163	Pengadilan Negeri Praya
164	Pengadilan Negeri Selong
165	Pengadilan Negeri Mataram
166	Pengadilan Negeri Raba/Bima
167	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
168	Pengadilan Tinggi Kupang
169	Pengadilan Negeri Kupang
170	Pengadilan Negeri Oelamasi
171	Pengadilan Tinggi Pontianak
172	Pengadilan Negeri Sambas
173	Pengadilan Negeri Putussibau
174	Pengadilan Negeri Sanggau
175	Pengadilan Negeri Mempawah
176	Pengadilan Negeri Ketapang
177	Pengadilan Negeri Sintang
178	Pengadilan Negeri Singkawang
179	Pengadilan Negeri Pontianak
180	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
181	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
182	Pengadilan Negeri Sampit
183	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
184	Pengadilan Negeri Palangkaraya
185	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
186	Pengadilan Negeri Banjarmasin
187	Pengadilan Negeri Batulicin
188	Pengadilan Negeri Kandangan
189	Pengadilan Negeri Banjarbaru
190	Pengadilan Negeri Pelaihari
191	Pengadilan Negeri Marabahan
192	Pengadilan Negeri Rantau
193	Pengadilan Negeri Kotabaru
194	Pengadilan Negeri Barabai
195	Pengadilan Negeri Amuntai
196	Pengadilan Negeri Martapura
197	Pengadilan Negeri Tanjung
198	Pengadilan Tinggi Samarinda
199	Pengadilan Negeri Sangatta
200	Pengadilan Negeri Nunukan
201	Pengadilan Negeri Tanah Grogot
202	Pengadilan Negeri Tanjung Redep
203	Pengadilan Negeri Balikpapan
204	Pengadilan Negeri Samarinda
205	Pengadilan Negeri Tarakan
206	Pengadilan Negeri Tenggarong
207	Pengadilan Tinggi Manado
208	Pengadilan Negeri Amurang
209	Pengadilan Negeri Airmadidi
210	Pengadilan Negeri Bitung
211	Pengadilan Negeri Tondano
212	Pengadilan Negeri Kotamobagu
213	Pengadilan Negeri Manado
214	Pengadilan Tinggi Palu

NO	NAMA SATUAN KERJA
215	Pengadilan Negeri Poso
216	Pengadilan Negeri Donggala
217	Pengadilan Negeri Palu
218	Pengadilan Negeri Luwuk
219	Pengadilan Tinggi Makassar
220	Pengadilan Negeri Palopo
221	Pengadilan Negeri Watampone
222	Pengadilan Negeri Pinrang
223	Pengadilan Negeri Sidrap
224	Pengadilan Negeri Pare-Pare
225	Pengadilan Negeri Sungguminasa
226	Pengadilan Negeri Makassar
227	Pengadilan Tinggi Kendari
228	Pengadilan Negeri Kolaka
229	Pengadilan Negeri Unaaha
230	Pengadilan Negeri Raha
231	Pengadilan Negeri Kendari
232	Pengadilan Tinggi Gorontalo
233	Pengadilan Negeri Gorontalo
234	Pengadilan Tinggi Ambon
235	Pengadilan Negeri Ambon
236	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
237	Pengadilan Negeri Ternate
238	Pengadilan Tinggi Jayapura
239	Pengadilan Negeri Sorong
240	Pengadilan Negeri Jayapura





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B.1723 /HK.00.01/6/2022
Sifat : Segera
Hal : Penandatanganan Nota Kesepahaman dan
Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana
Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

Jakarta, 15 Juni 2022

Kepada Yth. :

1. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK
Selaku Koordinator Tim Stranas Pencegahan Korupsi
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
3. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung
4. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjenpas Kemenkumham
5. Kapusdaskrimti Kejagung
6. Kapusiknas Bareskrim Polri
7. Karobinopsnal Bareskrim Polri
8. Direktur Interdiksi BNN

Merujuk Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Menko Polhukam Nomor : B.63/HK.00.01/6/2022 tanggal 3 Juni 2022 telah diinformasikan mengenai rencana Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama (PKB) tentang SPPT-TI yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2022 di Mahkamah Agung (terlampir).
2. Untuk itu dalam meningkatkan implementasi dan pengembangan SPPT-TI, maka kiranya seluruh satuan kerja Lembaga Penegak Hukum dapat mengikuti jalannya kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKB tentang SPPT-TI. Adapun satuan kerja dan pejabat yang perlu mengikuti adalah (rincian terlampir) :

a. Mahkamah Agung :

1) Pengadilan Tinggi :

- a) Ketua; ✓
- b) Panitera;
- c) Hakim Tinggi.

2) Pengadilan Negeri :

- a) Ketua; ✓
- b) Panitera;
- c) Hakim.

b. Ditjenpas Kemenkumham :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan :
Kepala.
- 2) Rumah Tahanan Negara :
Kepala.
- 3) Balai Pemasyarakatan :
Kepala.
- 4) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara :
Kepala.

c. Kejaksaan :

- 1) Kejaksaan Tinggi :
 - a) Kepala;
 - b) Aspidum;
 - c) Aspidus.
- 2) Kejaksaan Negeri :
 - a) Kepala;
 - b) Kasi Pidum;
 - c) Kasi Pidsus.
- 3) Cabang Kejaksaan Negeri :
Kepala.

d. Polri

- 1) Kepolisian Daerah :
 - a) Kepala;
 - b) Dirreskrimum;
 - c) Direskrimsus;
 - d) Dirnarkoba.
- 2) Kepolisian Resor :
 - a) Kepala;
 - b) Kasat Reskrim;
 - c) Kasat Narkoba.
- 3) Kepolisian Sektor :
Kepala.

e. BNN :

- 1) BNN Provinsi :
Kepala.
- 2) BNN Kabupaten/Kota :
Kepala.

3. Selanjutnya diinformasikan bahwa untuk satuan kerja LPH dapat mengikuti jalannya kegiatan dimaksud secara daring melalui *link* berikut :

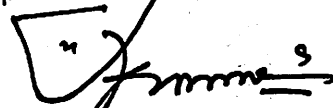
Aplikasi Zoom

ID : 811 0130 4259

Pass : #indonesia

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidkoo Hukum dan HAM,



Dr. Sugeng Purnomo

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Menko Polhukam;
3. Menkumham;
4. Menkominfo;
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
6. Jaksa Agung;
7. Kapolri;
8. Ketua KPK;
9. Kepala BSSN;
10. Kepala Staf Kepresidenan.

Daftar Wilayah dan Satker Target Implementasi SPPT TI Tahun 2022

1. **DKI Jakarta :**
 - 1) Jakarta Pusat;
 - 2) Jakarta Utara;
 - 3) Jakarta Barat;
 - 4) Jakarta Timur;
 - 5) Jakarta Selatan.
2. **Jawa Barat :**
 - 1) Bandung;
 - 2) Kota Bandung;
 - 3) Bogor;
 - 4) Kota Bogor;
 - 5) Bekasi;
 - 6) Kota Bekasi;
 - 7) Depok;
 - 8) Cirebon;
 - 9) Kota Cirebon;
 - 10) Indramayu;
 - 11) Sukabumi;
 - 12) Kota Sukabumi;
 - 13) Karawang;
 - 14) Kota Tasikmalaya;
 - 15) Garut;
 - 16) Cianjur;
 - 17) Subang;
 - 18) Sumedang;
 - 19) Majalengka;
 - 20) Purwakarta;
 - 21) Ciamis.
3. **Banten :**
 - 1) Tangerang;
 - 2) Lebak;
 - 3) Serang;
 - 4) Pandeglang.
4. **Jawa Tengah :**
 - 1) Kota Semarang;
 - 2) Surakarta;
 - 3) Cilacap;
 - 4) Kebumen;
 - 5) Pekalongan;
 - 6) Pati;
 - 7) Grobogan;
 - 8) Banyumas;
 - 9) Kab. Magelang;
 - 10) Demak.
5. **Jawa Timur :**
 - 1) Surabaya;
 - 2) Sidoarjo;
 - 3) Jember;
 - 4) Kab. Malang;
 - 5) Kota Malang;
 - 6) Banyuwangi;
 - 7) Jombang;
 - 8) Pasuruan;
 - 9) Kab. Kediri;
 - 10) Probolinggo;
 - 11) Bojonegoro;
 - 12) Kab. Mojokerto;
 - 13) Gresik;
 - 14) Tuban;
 - 15) Blitar;
 - 16) Lumajang;
 - 17) Tulungagung;
 - 18) Bangkalan.
 - 19) Nganjuk;
 - 20) Bondowoso;
 - 21) Magetan;
 - 22) Sumenep;
 - 23) Situbondo;
 - 24) Ngawi;
 - 25) Kota Kediri;
 - 26) Kab. Madiun;
 - 27) Lamongan;
 - 28) Sampang.
6. **DIY :**
 - 1) Yogyakarta;
 - 2) Sleman;
 - 3) Bantul;
 - 4) Kulon Progo.
7. **Aceh :**
 - 1) Banda Aceh;
 - 2) Aceh Utara;
 - 3) Pidie;
8. **Sumatera Utara :**
 - 1) Pematang Siantar;
 - 2) Medan;
 - 3) Deli Serdang;
 - 4) Langkat;
 - 5) Labuhan Batu;
 - 6) Asahan;
 - 7) Batu Bara;
 - 8) Serdang Bedagai;
 - 9) Tapanuli Selatan;
 - 10) Simalungun;
 - 11) Binjai;
 - 12) Sibolga;
 - 13) Labuhan Batu Selatan;
 - 14) Tapanuli Utara;
 - 15) Karo;
 - 16) Toba Samosir;
 - 17) Mandailing Natal.
9. **Sumatera Selatan :**
 - 1) Palembang;
 - 2) Musi Banyuasin;
 - 3) Lubuk Linggau;
 - 4) Ogan Komering Ilir;
 - 5) Muara Enim;
 - 6) Ogan Komering Ulu;
 - 7) Lahat;
 - 8) Prabumulih;
 - 9) Ogan Komering Ulu Timur.
10. **Sumatera Barat :**
 - 1) Padang;
 - 2) Pasaman Barat;
 - 3) Pariaman.
- 11) Jepara;
- 12) Batang;
- 13) Pemalang;
- 14) Klaten;
- 15) Kendal;
- 16) Temanggung;
- 17) Blora.
- 4) Langsa;
- 5) Tamiang;
- 6) Bireun;
- 7) Aceh Timur;
- 8) Lhokseumawe.

11. **Jambi :**
 - 1) Jambi;
 - 2) Muaro Jambi;
 - 3) Bungo.
12. **Bengkulu :**
 - 1) Bengkulu;
 - 2) Bengkulu Utara;
 - 3) Ranjang
Lembong.
13. **Lampung :**
 - 1) Bandar Lampung;
 - 2) Lampung Selatan;
 - 3) Lampung Tengah;
 - 4) Tulang Bawang;
 - 5) Tanggamus;
 - 6) Lampung Timur;
 - 7) Lampung Utara;
 - 8) Way Kanan;
 - 9) Metro.
14. **Bangka Belitung :**
 - 1) Bangka;
 - 2) Pangkal Pinang;
 - 3) Bangka Barat.
15. **Riau :**
 - 1) Pekanbaru;
 - 2) Rokan Hilir;
 - 3) Kampar;
 - 4) Bengkalis;
 - 5) Indragiri Hulu;
 - 6) Dumai;
 - 7) Rokan Hulu;
 - 8) Siak;
 - 9) Palalawan;
 - 10) Indragiri Hilir.
16. **Kep. Riau :**
 - 1) Batam;
 - 2) Tanjung Pinang;
 - 3) Karimun.
17. **Kalimantan Utara :**
 - 1) Tarakan;
 - 2) Nunukan.
18. **Kalimantan Barat :**
 - 1) Pontianak;
 - 2) Mempawah;
 - 3) Ketapang;
 - 4) Kapuas Hulu;
 - 5) Sanggau;
 - 6) Singkawang;
 - 7) Sintang;
 - 8) Sambas.
19. **Kalimantan Tengah:**
 - 1) Palangkaraya;
 - 2) Kotawaringin Timur;
 - 3) Kapuas;
 - 4) Kotawaringin Barat.
20. **Kalimantan Selatan:**
 - 1) Banjarmasin;
 - 2) Banjar;
 - 3) Kotabaru;
 - 4) Tanah Laut;
 - 5) Tanah Bumbu;
 - 6) Tapin;
 - 7) Barito Kuala;
 - 8) Banjarbaru;
 - 9) Tabalong;
 - 10) Hulu Sungai Selatan;
 - 11) Hulu Sungai Tengah;
 - 12) Hulu Sungai Utara.
21. **Kalimantan Timur :**
 - 1) Samarinda;
 - 2) Balikpapan;
 - 3) Kutai Kartanegara;
 - 4) Kutai Timur;
 - 5) Paser;
 - 6) Berau.
22. **Bali :**
 - 1) Kota Denpasar;
 - 2) Buleleng.
23. **Nusa Tenggara Barat:**
 - 1) Mataram;
 - 2) Sumbawa;
 - 3) Kota Bima;
 - 4) Lombok Tengah;
 - 5) Lombok Timur.
24. **Nusa Tenggara Timur :**
 - 1) Kota Kupang;
 - 2) Kab. Kupang.
25. **Sulawesi Utara :**
 - 1) Manado;
 - 2) Kotamobagu;
 - 3) Minahasa Utara;
 - 4) Minahasa Selatan;
 - 5) Bitung;
 - 6) Minahasa.
26. **Sulawesi Tengah :**
 - 1) Palu;
 - 2) Poso;
 - 3) Banggai;
 - 4) Donggala.
27. **Sulawesi Tenggara:**
 - 1) Kendari;
 - 2) Muna;
 - 3) Kolaka;
 - 4) Konawe.
28. **Sulawesi Selatan :**
 - 1) Makassar;
 - 2) Gowa;
 - 3) Pinrang;
 - 4) Bone;
 - 5) Sidenreng Rappang;
 - 6) Pare Pare;
 - 7) Palopo.
29. **Gorontalo :**
 - 1) Gorontalo.
30. **Maluku :**
 - 1) Ambon.
31. **Maluku Utara :**
 - 1) Ternate.
32. **Papua :**
 - 1) Jayapura.
33. **Papua Barat :**
 - 1) Sorong.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 63. /HK.00.01/6/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Eks.
Hal : Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja
Bersama SPPT-TI.

Jakarta, 3 Juni 2022

Kepada Yth. :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung
2. Menkumham
3. Menkominfo
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas
5. Jaksa Agung
6. Kapolri
7. Ketua KPK
8. Kepala BSSN
9. Kepala Staf Kepresidenan
10. Kepala BNN

Merujuk Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 sebelumnya didasarkan pada Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2021.
2. Atas hal tersebut, Kemenko Polhukam selaku Koordinator SPPT-TI telah memfasilitasi penyusunan Nota Kesepahaman dan PKB SPPT-TI yang hasilnya telah disetujui seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.
3. Sebagai informasi awal, penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKB SPPT-TI tahun 2022 akan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga, yang direncanakan pada tanggal 21 Juni 2022 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Yth. Presiden RI.

**RUNDOWN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PEDOMAN
KERJA BERSAMA TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA TEERPADU
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI)**

NO	AGENDA	PELAKSANA	WAKTU	KET
1	Registrasi		13.00-14.00	
2	Pembukaan : a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya b. Pembacaan Doa	Pembawa Acara	14.00-14.10	
3	Penayangan Video Profil SPPT-TI		14.10-14.15	
4	Pembacaan Nota Kesepahaman		14.15-14.25	
5	Penandatanganan Nota Kesepahaman SPPT-TI	a. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung; b. Menko Polhukam; c. Menkumham; d. Menkominfo; e. Menteri PPN/Kepala Bappenas; f. Jaksa Agung; g. Kapolri; h. Ketua KPK; i. Kepala BNN; j. Kepala BSSN; k. Kepala Staf Kepresidenan.	14.25-14.40	
6	Foto Bersama			
7	Penandatanganan PKB SPPT-TI	a. Panitera Mahkamah Agung; b. Dirjen Badilum Mahkamah Agung; c. Sekretaris Mahkamah Agung; d. Deputi Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam; e. Dirjen Pemasarakatan, Kemenkumham; f. Dirjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo; g. Deputi Polhukhankam, Bappenas; h. Jambin Kejagung; i. Jampidum Kejagung; j. Jampidsus Kejagung; k. Kabareskrim; l. Deputi Penindakan dan Eksekusi, KPK; m. Deputi Pemberantasan, BNN; n. Deputi Operasi Keamanan Siber Dan Sandi, BSSN; o. Deputi Polhukhankam, KSP;	14.40-14.55	
8	Penyampaian Perkembangan SPPT-TI	Menko Polhukam	14.55-15.05	
9	Keynote Speech	Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung	15.05-15.15	
10	Simulasi Pertukaran, Pemanfaatan dan Implementasi TTE Tersertifikasi pada SPPT-TI	Perwakilan Lembaga Penegak Hukum	15.15-15.55	
11	Penutup	Pembawa Acara	15.55	